



Judul : DPR: Indonesia Emas 2045 Bisa Terhambat  
Tanggal : Minggu, 18 Juni 2023  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

## DPR: Indonesia Emas 2045 Bisa Terhambat

PARLEMEN bakal menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi soal tidak optimalnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen Pemerintah dalam mengeksekusi program-program strategis dengan tertib, merupakan kunci tercapainya Indonesia Emas 2045.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan, kemampuan Pemerintah dalam merealisasikan program-program strategis nasional berdasarkan APBN, yang telah disiapkan akan menentukan Indonesia berhasil meraih Indonesia Emas 2045 atau tidak.

"Tahun 2045 merupakan puncak pertumbuhan Indonesia dengan mengoptimalkan bonus demografi. Mayoritas yakni 70 persen dari total penduduk negara Indonesia berada di kalangan produktif," kata Esti kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurutnya, Indonesia juga sudah komit merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Tolok ukur keberhasilan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga dengan memperhatikan dampak sosial masyarakat seutuhnya.

Baik melalui kualitas pendidikan yang memadai, layanan kesehatan optimal, hingga pemberdayaan lainnya tanpa mengorbankan lingkungan hidup.

"Karena itu, dalam mengedepankan *people, planet, profit* saya yakin Indonesia akan berhasil meraih masa depan unggul sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, untuk mengoptimalkan penggunaan APBN, DPR saat ini di tengah melaksanakan

fungsi anggaran. Khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap realisasi program dari setiap mitra kerja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2023, hingga melakukan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2024.

Esti mengakui, dalam proses evaluasi, ada beberapa program yang realisasi anggarannya sangat tidak optimal hingga di bawah 10 persen. Dikhawatirkan, program tersebut akan telantar hingga menimbulkan anggaran yang tidak produktif.

Jika anggaran yang tadinya ditujukan untuk program strategis, seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan hingga dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak di belanjakan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

"Ini salah satu masalah yang kami temukan dalam menjalankan fungsi anggaran. Maka sistem *check and balance* antara DPR dan Pemerintah merupakan fondasi yang dibutuhkan agar program terlaksana sesuai rencana," tegasnya.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto bilang, tidak optimalnya penggunaan APBN dan APBD merupakan bentuk lemahnya perencanaan program Pemerintah dan di hulu dan pengawasan di hilir yang kurang kuat.

"Akibatnya, APBN ataupun APBD salah sasaran dan bocor," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurutnya, penggunaan dan optimalisasi APBN ataupun APBD menjadi masalah serius yang harus dibenahi Pemerintah. Pasalnya, banyak program kerakyatan bergantung pada anggaran negara. ■ DIR